

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

fys.2007

1

4/4/2021

BENTUK PENYAMPAIAN INFORMASI TERHADAP KONSUMEN

- REPRESENTASI
- PERINGATAN
- INSTRUKSI

KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN)
- LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM)
- BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

PERSOALAN POKOK LPKSM

- STRUKTUR ORGANISASI/KLASIFIKASI LEMBAGA KONSUMEN
- SUMBER DANA LEMBAGA KONSUMEN
- JENIS KEGIATAN LEMBAGA KONSUMEN

PROSEDUR BERACARA

- HAK GUGAT LEMBAGA KONSUMEN (LEGAL STANDING)
- GUGATAN KELOMPOK (CLASS ACTION)
- BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK



TUGAS BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

- MEMBERIKAN SARAN & REKOMENDASI KPD PEMERINTAH KHUSUSNYA DLM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN;
- MELAKUKAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU DI BIDANG PERL KONS;
- MELAKUKAN PENELITIAN TERHADAP BARANG DAN JASA YG MENYANGKUT KESELAMATAN KONSUMEN;
- MENDORONG BERKEMBANGNYANYA LEMBAGA LPKSM;
- MENYEBARLUASKAN INFORMASI MELALUI MEDIA MENGENAI PK;
- MENERIMA PENGADUAN TENTANG PK DR MASY, LPKSM ATAU PELAKU USAHA;
- MELAKUKAN SURVEI YG MENYANGKUT KEBUTUHAN KONSUMEN.

TUGAS LPKSM (PASAL 44 AYAT 3 UUPK)

- MENYEBARKAN INFORMASI DLM RANGKA MENINGKATKAN KESADARAN ATAS HAK DAN KEWAJIBAN DAN KEHATI-HATIAN KONSUMEN DLM MENGONSUMSI BARANG DAN/ATAU JASA (CONSUMER EDUCATION);
- MEMBERIKAN NASIHAT KPD KONSUMEN (CONSUMER ADVICE CENTER)
- BEKERJASAMA DENGAN INSTANSI TERKAIT DLM UPAYA MEWUJUDKAN PK
- MEMBANTU KONSUMEN DALAM MEMPERJUANGKAN HAKNYA, TERMASUK MENERIMA KELUHAN ATAU PENGADUAN KONSUMEN (COMPLAINT HANDLING);
- MELAKUKAN PENGAWASAN BERSAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PK.

ANGGOTA BPSK TERDIRI 3 UNSUR :

1. PEMERINTAH
2. UNSUR KONSUMEN (DLM HAL INI DIWAKII OLEH LEMBAGA KONSUMEN SETEMPAT)
3. UNSUR PELAKU USAHA.

MASING2 UNSUR BERJUMLAH
SEDIKITNYA 3 ORANG DAN MAX 5
ORANG

TUGAS DAN WEWENANG BPSK

- MELAKSANAKAN PENANGAN & PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI MEDIASI, KONSILIASI ATAU ARBITRASE;
- MEMBERIKAN KONSULTASI PK;
- MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENCATUMAN KLAUSULA BAKU
- MELAPOR KPD PENYIDIK APABILA TERJADI DUGAAN ADA PELANGGARAN KETENTUAN DALAM UUPK;
- MENERIMA PENGADUAN BAIK TERTULIS /TDK TERTULIS, DR KONS TENTANG DUGAAN TERJADINYA PELANGGARAN TERHADAP PK;
- MELAKUKAN PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN SENGKETA PK;
- MMANGGIL PELAKU USAHA YG DIDUGA TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN THD PK;
- MEMANGGIL DAN MENGHADIRKAN SAKSI, SAKSI AHLI DAN ATAU SETIAP ORANG YG DIANGGAP MENGETAHUI PELANGGARAN THDP UUPK;
- MEMINTA BANTUAN PENYIDIK UTK MENGADIRKAN PELAKU USAHA, SAKSI, SAKSI AHLI, ATAU SETIAP ORANG YG TDK BERSEDIA MEMENUHI PANGGIAN BPSK;
- MENDAPATKAN, MENELITI DAN ATAU MENILAI SURAT, DOKUMEN, ATAU ALAT BUKTI LAIN GUNA PENYELIDIKAN DAN ATAU PEMERIKSAAN;
- MEMUTUSKAN & MENETAPKAN ADA ATAU TIDAK ADANYA KERUGIAN DI PIHAK KONSUMEN;
- MEMBERITAHUKAN PUTUSAN KPD PELAKU USAHA YG MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP PK;
- MENJATUHKAN SANKSI ADMINISTRASI KPD PU YG MELANGGAR KETENTUAN UUPK.

HAK GUGAT LEMBAGA KONSUMEN (LEGAL STANDING) PASAL 46 AYAT (1) HURUF C

- ◆ LPKSM BERBENTUK BADAN HUKUM
ATAU YAYASAN
- ◆ DLM AD NYA MENYEBUTKAN DGN
TEGAS BAHWA TUJUAN DIDIRIKAN
ORGANISASI TSB ADALAH UTK
KEPENTINGAN PK;
- ◆ TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN
SESUAI DENGAN AD NYA

GUGATAN KELOMPOK (CLASS ACTION) PASAL 46 AYAT (1) HURUF B DISEBUTKAN

GUGATAN KELOMPOK HARUS DIAJUKAN
OLEH KONSUMEN YANG BENAR-BENAR
DIRUGIKAN DAN DAPAT DIBUKTIKAN
SECARA HUKUM, SALAH SATU
DIANTARANYA ADALAH BUKTI
TRANSAKSI

BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK

- ◆ PASAL 22 UUPK DISEBUTKAN PEMBUKTIAN TERHADAP ADA TIDAKNYA UNSUR KESALAHAN DALAM KASUS PIDANA MERUPAKAN BEBAN DAN TANGGUNG JAWAB PU TANPA MENUTUP KEMUNGKINAN BAGI JAKSA UTK MELAKUKAN PEMBUKTIAN.
- ◆ PASAL 28 UUPK DISEBUTKAN, PEMBUKTIAN TERHADAP ADA TIDAKNYA UNSUR KESALAHAN DALAM GUGATAN GANTI RUGI MERUPAKAN BEBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA.